



Keluarga Istimewa



ꦏꦺꦭꦸꦁꦫꦶꦲꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦪ

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Tingkatkan Peran Perguruan Tinggi



"Konselor yang baik adalah yang mampu mendengarkan dengan baik, memahami cerita yang disampaikan serta memiliki rasa empati yang tinggi".

Ferian Fembriansyah
Ketua Forum Genre DIY



TELEKONSELING TESAGA

Konseling Tesaga

Halo kak Tesa, aku mau cerita. Aku baru aja naik kelas 12 SMK, ngkk kerasa sebentar lagi aku mau lulus sekolah. Aku bingung banget mau kuliah dulu atau kerja dulu dan dua pilihan itu ada konsekuensinya semua. Kalau lanjut kuliah, aku masih belum tau mau masuk jurusan apa dan terkendala biaya juga, tapi kalau langsung kerja, zaman sekarang sepertinya pekerjaan yang layak lebih banyak untuk lulusan S1 sedangkan untuk lulusan SMK tuh kayak kerja seabiswa gitu. Aku pengen banget buat orang tua bangga, entah itu dengan kuliah atau bekerja yang layak. Menurut kak Tesa mending kuliah atau kerja dulu?

Jawaban:

Halo ?? Sebelumnya terima kasih banyak ya sudah mau bercerita ke TeSAGA. kak tesa sepakat banget dengan pemikiranmu, bahwa mau lanjut kuliah atau bekerja perlu ada pertimbangan dan keduanya pasti ada plus minusnya masing-masing. Jika dalam posisimu, kak tesa akan membuat planning atau catatan yang berisi plus minus masing-masing pilihan, kemudian juga tuliskan upaya-upaya apa aja yang mungkin bisa kamu usahakan jika memilih bekerja dan kuliah. Kamu bisa cari tahu juga lewat alumni atau guru BKmu mengenai link pekerjaan yang bisa kamu coba apply untuk lulusan SMK. Kamu juga bisa mencari tahu beasiswa yang bisa kamu akses jika ingin melanjutkan kuliah, dan persiapan untuk apply beasiswa dari sekarang yaaa biar bisa lebih matang dan hasil yang diperoleh jadi maksimal. Belum terlambat untuk mempertimbangkan dan mengupayakannya dari sekarang. Semoga dimudahkan selalu dan diberi semangat untuk mencapai cita-citamu. Ingat masa depanmu masih panjang, meskipun masih panjang, namun masa depanmu ditentukan dari hari ini, jadi jangan patah semangat yaa buat mengejar cita-cita ??

Jika Anda memiliki permasalahan dan membutuhkan bantuan layanan konsultasi dapat menghubungi TeSAGA (Telekonseling Sahabat Anak dan Keluarga). TeSAGA DIY merupakan layanan telekonseling gratis bagi semua anak dan orang tua yang membutuhkan pendampingan dan perlindungan khusus, hubungi hotline. TeSAGA untuk mendapatkan layanan konsultasi TeSAGA.

HOTLINE PUSPAGA DAN UPT PPA

Jika menemui / mengalami masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak silahkan menghubungi hotline dibawah ini untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari tindak kekerasan. Layanan Puspaga dan UPT PPA dapat diakses secara GRATIS. Akses Layanan Konseling dan Parenting

1. Puspaga Prima DIY : WA : 081329426807 IG : puspaga.diy
2. Puspaga Kenari (Kota Yogyakarta): WA : 08112848404 IG : puspagakenarijogja
3. Puspaga Kesengsem (Kab. Sleman): Telp : 081910336614/ 081299064982/ 085643808677 Email: puspagakesengsem.sleman@gmail.com IG : puspagakesengsem.sleman
4. Puspaga Handayani (Kab. Gunung Kidul): WA : 085940638952 IG : puspaga_handayani
5. Puspaga Projatamansari (Kab. Bantul): WA : 081215444872 IG : puspaga.projatamansari

Lembaga Layanan yang Dapat di Akses

1. UPT Balai Perlindungan Perempuan dan Anak DIY: Telp.: (0274)5030707
2. Call Center SAPA 129 :Telp.: 129 WA : 08111-129-129
3. UPTD PPA Kota Yogyakarta : WA : 08112857799
4. UPTD PPA Sleman :WA : 081328012054
5. UPTD PPA Kulon Progo : Telp.: (0274) 775229
6. UPTD PPA Bantul : WA dan SMS: 087738907000 Telp.: (0274) 367331
7. P2TPAKK Reko Dyah Utami (DIY) : WA: 08995006959

SEBAGAI upaya memperkuat jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Perguruan Tinggi, Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY melaksanakan Koordinasi Fungsi Satgas PPKS, Jumat (8/9). Hadir langsung membuka acara kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2 DIY Hera Aprilia SKom MEng serta perwakilan Perguruan Tinggi negeri dan swasta di DIY.

"Sebagian besar Perguruan Tinggi di DIY sudah mempunyai Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Pemda DIY menyambut baik adanya Satgas PPKS tersebut. Harapannya DP3AP2 DIY dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan Satgas PPKS dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan secara optimal dan komprehensif mengingat korban kekerasan tidak hanya membutuhkan satu layanan saja, tapi mereka membutuhkan pelayanan yang bersifat komprehensif," sebut Hera.

Selain itu juga dijelaskan anak dan perempuan menjadi kelompok paling rentan terhadap kekerasan. Hal tersebut juga terjadi di DIY. Merujuk data, jumlah korban kekerasan yang ditangani di DIY pada 2022 mencapai 1.282 kasus. Mayoritas dari jumlah tersebut, yakni perempuan dengan persentase 89 persen. Sementara jenis kekerasan yang paling banyak dialami, yakni kekerasan psikis sebanyak 477 kasus. Lokus kejadian paling banyak terjadi di rumah dan pelaku mayoritas adalah pasangan suami/istri korban.

Dari Januari-Juli 2023, tercatat 583 Korban Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak yang ditangani Lembaga di DIY, 30 diantaranya berstatus mahasiswi. Jika dilihat lokasi kejadian korban kekerasan terhadap mahasiswi 30 persen di rumah kost, 20 persen di rumah korban, 13 persen di rumah pelaku, sisanya di tempat umum, lingkungan, hotel dan tempat wisata lainnya. Jenis kekerasan yang dialami juga beragam, diantaranya kekerasan dalam pacaran, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan berbasis online dan sebanyak 34 persen adalah pelecehan seksual.

Berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Sedangkan berdasarkan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala Perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya sebagaimana diatur dan ditentukan dalam UU TPKS.

Merujuk regulasi dan adanya kasus kekerasan seksual yang menimpa mahasiswi, maka Perguruan Tinggi wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual, meliputi pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.

Pembelajaran mewajibkan mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian. Penguatan tata Kelola merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi; membentuk Satgas; menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik/Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan atau luar area kampus; menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual; melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; sosialisasi berkala terkait pedoman pencegahan kekerasan seksual kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dan warga kampus; memasang tanda informasi yang berisi layanan aduan kekerasan seksual dan peringatan bahwa Perguruan Tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual; menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Perguruan Tinggi juga wajib melakukan penanganan kekerasan seksual, meliputi pendampingan, perlindungan, peneraan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Pendampingan oleh Perguruan Tinggi bisa meliputi konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi dan bimbingan sosial dan Rohani. Dalam hal perlindungan, dapat dilakukan dengan jaminan keberlanjutan penyelesaian Pendidikan, jaminan keberlanjutan

pekerjaan bagi Pendidik dan Tenaga kependidikan di Perguruan Tinggi bersangkutan, jaminan perlindungan dari ancaman fisik, nonfisik atau keberulangan kekerasan seksual, perlindungan atas kerahasiaan identitas, penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, penyediaan akses informasi penyelenggaraan pelayanan. Pengenaan sanksi administratif dapat secara ringan, sedang dan berat. Dalam penanganan kasus kekerasan Perguruan Tinggi juga bisa melakukan koordinasi, sinergi dengan Pemda DIY.

Peran Pemda DIY dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual diantaranya memperkuat aspek legal, sosialisasi edukasi dan publikasi, serta pelatihan/capacity building. Telah diterbitkan Pergub DIY No 21 Tahun 2019 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan, Pergub DIY No 5 Tahun 2019 tentang P2TPAKK Reko Dyah Utami dan Pergub DIY No 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk yang didalamnya termuat UPT PPA yang menangani permasalahan Perempuan dan Anak bersama P2TPAKK RDU. Selain itu memfasilitasi Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak DIY, membentuk kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), membentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), fasilitasi layanan Telekonseling Sahabat Anak dan Keluarga (TeSAGA DIY) dan Pusat Pembelajaran Keluarga Prima DIY, tersedia data gender dan anak. (*)

PENYULUHAN KONSELING

Keterampilan Memahami Diri pada Remaja



Narasumber dan peserta konseling

KR-Istimewa

DALAM rangka memberikan edukasi terkait bagaimana mendapatkan keterampilan dalam memahami diri untuk menggali potensi secara lebih maksimal khususnya kelompok remaja, Puspaga Prima DIY menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dengan tema "Keterampilan Memahami Diri pada Remaja" di Ruang Pertemuan Lantai III Balai PPA Jalan Tentara Rakyat Mataram No 53 Bumiyo Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, Kamis (7/9). Kegiatan tersebut dibuka Arie Asimilia SSos mewakili Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY. Turut hadir sebagai pembicara, Agustin Dwi Widowati MPsi yang juga bertugas sebagai psikolog di Puspaga Prima DIY.

"Kegiatan ini juga bertujuan mengajak remaja menjadi pribadi yang berdaya dan memiliki mental

sehat. Selain itu, mereka diharapkan lebih peduli dengan persoalan di sekitarnya, baik lingkungan sekolah maupun keluarga. Sekaligus dapat membantu orang lain termasuk teman sebaya dalam mengakses layanan Puspaga Prima DIY jika mengalami persoalan," urai Arie Asimilia. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari penyuluhan sebelumnya yang dilaksanakan pada 21 Agustus 2023, membahas kesehatan mental pada remaja. Berbeda dengan kegiatan sebelumnya, penyuluhan ini lebih menekankan interaksi dua arah antara narasumber dan peserta sehingga forum diskusi lebih dinamis. Agustin Dwi Widowati menjelaskan, kesehatan mental seseorang bisa dicapai dengan menjadi pribadi berdaya. Ketika individu sudah berdaya, akan mampu mengambil keputusan secara bijaksana, menjadi pribadi percaya diri dan mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi

sesuai konteks.

Selanjutnya untuk menjadi pribadi yang berdaya, setiap individu harus mampu mengenali kelebihan dan kekurangan pada diri masing-masing. "Kekurangan pada diri individu akan menjadi media pengembangan ke depannya. Nilai pentingnya keterampilan untuk memahami diri," sebutnya.

Untuk menjadi pribadi positif dan berdaya, individu (remaja) perlu mencari ruang-ruang yang mampu memfasilitasi penggalan potensi diri. Misalnya berteman dan bersosialisasi dengan orang dan lingkungan yang membawa pengaruh positif.

Ada banyak hal yang perlu diketahui dan digali untuk bisa mengenali potensi diri yang sesungguhnya. Namun hal ini membutuhkan waktu lama. Dalam proses ini, setiap individu butuh pembiasaan, adaptasi, penerimaan diri serta mindset yang positif. (*)-f

RAKOR POKJA PUG 2023

Wujudkan Perencanaan Responsif Gender

SESUAI Permendagri 67 Tahun 2011, menjadi acuan Pemda DIY dalam mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan daerah. Untuk itulah perlu dilakukan berbagai upaya. Salah satunya menyusun strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui pembentukan kelompok kerja (Pokja) PUG dan menyusun Rencana Aksi Daerah.

Mewujudkan perencanaan yang responsif gender, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Peraturan Daerah (PD), Menyusun penganggaran yang responsif gender, Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. Proses penerapan PUG ini akan dilakukan evaluasi dan penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

Dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan PUG dan mempersiapkan penilaian dalam rangka APE, pada 5 September 2023 telah dilaksanakan Rakor Pokja PUG. Rakor ini merupakan upaya perangkat daerah untuk saling mengkoordinasikan kebijakan, perencanaan penganggaran dan pelaksanaan program yang responsif gender. Rakor dipimpin Wakil Gubernur DIY di Gedhong Pracimasana Kepatihan Sisi Barat Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta. Selama 3 tahun berturut turut, Pemda DIY mendapatkan penghargaan tertinggi yakni Mentor.

Sementara PUG dilakukan dengan melakukan Perencanaan Responsif Gender (PRG), yaitu perencanaan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Bentuknya berupa Anggaran Responsif Gender (ARG). Tujuannya sebagai upaya menjamin agar anggaran yang dikeluarkan pemerintah beserta kebijakan dan program yang mendasarinya dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan setiap warga negara dari kelompok manapun, baik laki-laki maupun perempuan. Merupakan anggaran yang disusun dan disahkan melalui proses analisis dalam perspektif gender. (*)-f

Mengenal Pemilih Pemula: Kunci Masa Depan Demokrasi

Pemilu adalah salah satu pilar pondasi demokrasi, dan memilih pemula adalah elemen penting dalam proses demokratisasi. Mereka adalah generasi muda yang baru pertama kali memiliki hak suara dalam pemilihan umum. Artikel ini akan menggalang lebih dalam tentang peran dan tantangan yang dihadapi oleh pemilih pemula dalam proses demokrasi.

Apakah Anak Termasuk Pemilih Pemula?

Pemilih pemula adalah warga negara yang baru saja mencapai usia memilih, yakni pada umur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Menurut pasal 1 UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Maka dari itu anak juga bisa didefinisikan sebagai pemilih pemula bagi yang sudah mencapai umurnya.

Peran Pemilih Pemula dalam Demokrasi Partisipasi pemilih

pemula adalah penting bagi kesehatan demokrasi. Mereka membawa energi segar, pandangan yang inovatif, dan keprihatinan akan isu-isu masa depan. Partisipasi aktif mereka dapat membantu memilih pemimpin yang mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi generasi muda. Tantangan yang Dihadapi Pemilih Pemula Meskipun memiliki potensi besar, pemilih pemula juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk:

1. Ketidapedulian Politik: Beberapa pemilih pemula mungkin merasa politik tidak relevan atau rumit.
 2. Kurangnya Pengetahuan Politik: Pemahaman tentang isu-isu politik seringkali terbatas.
 3. Minimnya Partisipasi: Beberapa pemilih pemula mungkin tidak merasa termotivasi untuk memilih.
- Mendorong Partisipasi Pemilih Pemula Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mendorong

partisipasi pemilih pemula. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan:

1. Pendidikan Politik: Meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem politik dan isu-isu penting.
 2. Kampanye yang Menginspirasi: Menciptakan kampanye yang relevan dan memotivasi untuk pemilih pemula.
 3. Kolaborasi: Kerja sama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan LSM untuk menyediakan sumber daya dan informasi.
- Masa Depan Demokrasi dalam Genggaman Pemilih Pemula Pemilih pemula adalah harapan masa depan demokrasi. Mereka memiliki potensi besar untuk membentuk arah politik dan sosial negara. Dengan mendukung mereka dalam memahami dan mengambil bagian dalam proses pemilihan, kita dapat memastikan bahwa demokrasi terus berkembang dan mencerminkan kepentingan semua warga negara. (*)-f

PEMBENTUKAN PIK-R

Wadah Remaja Tukar Informasi Tentang Kehidupannya

DINAS Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY mengadakan kegiatan Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling-Remaja (PIK-R) 2023 di lima Desa Mandiri Budaya di Kalurahan Trimurti, Srandakan, Bantul pada 6-7 September.

Kegiatan kali ini merupakan kegiatan Angkatan Ke-III. Kedua angkatan sebelumnya telah terlaksana pada Agustus 2023. Angkatan I di Kalurahan Bejiharjo Karangmojo Gunungkidul. Sedangkan angkatan II berada di Kalurahan Giring Paliyan Gunungkidul. Selanjutnya Angkatan IV dilaksanakan di Kalurahan Glagah Temon Kulonprogo dan Angkatan V akan bertempat di Kalurahan Jatimulyo Girimulyo Kulonprogo. Setiap kegiatan pelatihan melibatkan 20 peserta terdiri dari dua orang perangkat Kalurahan yang membimbing kegiatan

berkaitan remaja dan 18 peserta merupakan Anak/Remaja perempuan dan laki-laki berusia 14-22 Tahun dari Kalurahan setempat. Tujuan dilaksanakan Pembentukan PIK-R, memberikan wadah bagi remaja untuk mendapatkan atau bertukar informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan juga tentang perencanaan kehidupan berkeluarga serta kegiatan penunjang lainnya bagi remaja dengan tepat dan positif dari teman sebayanya. Dalam PIK-R juga dikembangkan kegiatan lain yang khas sesuai minat serta kebutuhan remaja. Peserta Pembentukan PIK-R mendapatkan materi-materi yang mendukung perkembangan diri remaja.

"Salah satu tugas PIK-R adalah menjadi konselor sebaya yang mampu mendengarkan dan tidak menghakimi. Konselor yang baik adalah ia yang mampu

mendengarkan dengan baik, memahami cerita yang disampaikan, serta memiliki rasa empati yang tinggi," kata Ferian Fembriansyah, Ketua Forum Genre DIY yang merupakan salah satu narasumber kegiatan tersebut.

Pada kesempatan tersebut juga dibentuk Forum PIK-R di Kalurahan Trimurti dengan ditetapkan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara. Selanjutnya memilih pengurus sebagai Divisi Seni budaya (2 orang), Divisi Olah Raga (2 orang), Divisi Pelatihan dan Pengembangan (2 orang), Divisi Humas dan Media (2 orang).

Dalam kesempatan tersebut hadir pula narasumber Indana Laazulfa SIP MKes dari LP3A Sleman, Amin Al Abid SPsi MPsi dari Universitas Proklamasi 45. Selanjutnya Maulida Anita Putri SPd selaku Fasilitator GenRe DIY dan Hindun Kurnia N dari BNNP DIY. (*)-f



0274 565003



087719292111



087719292111



@TeSaga DIY



@TeSaga DIY



TeSaga DIY



TeSaga DIY